

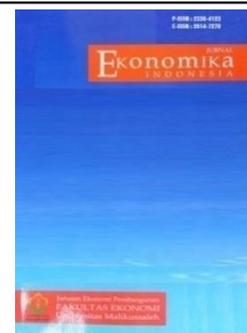
PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH DI INDONESIA TAHUN 2014-2018

Sari Weni Berutu^{*a}, Khairil Anwar^{*b}

^{*}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

a Corresponding author: weniberutu@gmail.com

b khairil.anwar.semsi@gmail.com



ARTICLE INFORMATION

ABSTRACT

Keywords:

Local Taxes, Regional
Repayments, Government
Expenditures

This study aims to determine the effect of local taxes and levies on Government expenditures in Indonesia in 2014-2018. The data used in this study is panel data from 2014 to 2018. The method used is panel data regression analysis. The results of the study partially show that local taxes have a positive and significant effect on Government expenditures in Indonesia in 2014-2018, and local fees do not have a significant effect on government expenditures in Indonesia in 2014-2018. Simultaneously, local taxes and levies have a positive and significant effect on government expenditures in Indonesia in 2014-2018.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan yang seringkali dihadapi oleh suatu pemerintah dalam sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Terbatasnya sumber daya, agar belanja yang dilakukan pemerintah produktif, maka harus dialokasikan penerimaan. Pemerintah menyusun anggaran yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kebijakan. Anggaran dalam pemerintah biasa disebut dengan APBN. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan harus dianggarkan dalam APBN (Kaweder, dkk (2008) dalam (Tolosang et al., 2013).

Pengelolaan keuangannya, pemerintah harus bisa mengoptimalkan penerimaannya dari sektor PAD. PAD ialah penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Kaweder, 2008) dalam (Sulistyowati, 2011).

Data Pajak, Retribusi dan Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 2014-2018

Sumber: BPS, 2020.

Tahun	Pajak (Milyar)	Retribusi (Milyar)	Pengeluaran Pemerintah (Milyar)
2014	103.087.606.002	1.705.308.478	36.839.387.037
2015	107.892.424.971	1.689.511.259	45.158.055.320
2016	112.689.762.824	1.875.861.563	44.776.710.219
2017	125.806.425.501	1.730.752.091	47.328.596.653
2018	128.475.985.357	1.905.875.563	59.589.051.984

Berdasarkan publikasi BPS 2020 Tabel 1.1 pajak 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 sebesar Rp.103.087.606.002 menjadi Rp.128.475.985.375 pada tahun 2018. Sementara itu, retribusi mengalami kondisi yang berfluktuasi. Pada tahun 2016, ketika pajak meningkat sebesar Rp.112.689.762.824 dari tahun sebelumnya sebesar Rp.107.892.424.971, namun pengeluaran pemerintah menurun sebesar Rp.44.776.710.219 dari tahun sebelumnya sebesar Rp.45.158.005.320.

Retribusi pada tahun 2016 juga meningkat sebesar Rp.1.875.861.563 dari tahun sebelumnya sebesar Rp.1.689.511.259, namun pengeluaran pemerintah juga menurun Rp.44.776.710.219 dari tahun sebelumnya sebesar Rp.45.158.005.320.

Tabel 1.1

Dengan memadainya pendapatan pemerintah.. Semakin besar pajak, besar pula PAD nya, PAD meningkat daerah tersebut menjadi daerah mandiri (Sukirno, 2015). Terwujudkannya kemandirian apabila PAD meningkat dari sektor retribusi daerah. PAD dapat meningkatkan alokasi belanja pemerintah kepada masyarakat dengan melakukan perbelanjaan (Harianto, 2007) dalam (Sulistyowati, 2011). Teori tersebut didukung hasil penelitian (Effendi, et.al, 2019) pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pemerintah di Indonesia. Selanjutnya, (Febriyanti, 2017) pajak dan retribusi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Penelitian (Effendi, et.al, 2019), telah mengkaji Determinan belanja pemerintah di Indonesia. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel pajak daerah, utang luar negeri, ekspor neto, belanja pemerintah dan metode ordinary least square, sedangkan penulis menggunakan pajak, retribusi, pengeluaran pemerintah dan metode analisis regresi data panel. Kemudian, penelitian sebelumnya di Indonesia sementara penulis di 33 Provinsi Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah suatu pelayanan kepada masyarakat atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah guna penyediaan barang-barang publik (Bastian, 2007) menurut (Mankiw, 2018), pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran belanja oleh pemerintah lokal, negara, hingga pemerintah federal. Menurut (Susanti, et.al, 2000) pengeluaran yaitu aspek penggunaan SDM yang dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak.

Pajak Daerah

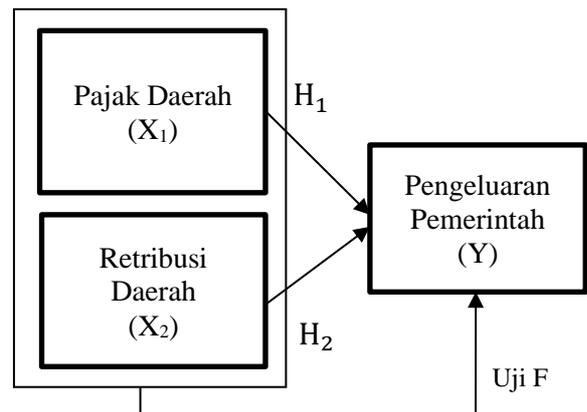
Pajak adalah suatu pembayaran wajib dilaksanakan sesuai aturan dimans diterapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan langsung (Susanti, et.al, 2000). Menurut (Raharjo, 2009) pajak merupakan iuran wajib penduduk. UU No 28 tahun 2009 dalam (Rahmawati, 2018) pajak adalah pemungutan wajib seseorang atau suatu badan

usaha tanpa ada imbalan langsung berdasarkan UU berlaku.

Retribusi Daerah

Retribusi iuran daerah tertentu untuk kepentingan seorang atau badan (Yani, 2002). Menurut retribusi (Boediono, 2001) adalah pembayaran bagi orang yang menikmati secara langsung jasa negara. Retribusi daerah penerimaan dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan kepada masyarakat.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

H₁ : Diduga pajak mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran pemerintah di Indonesia tahun 2014-2018..

H₂ : Diduga retribusi memiliki pengaruh terhadap pengeluaran pemerintah di Indonesia Tahun 2014-2018.

3. METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Data dalam bentuk data panel gabungan *time series* dan *cross section*. *Time series* 5 tahun dari tahun 2014 sampai 2018 dan data *cross section* 33 Provinsi Indonesia . Sehingga jumlah observasi 165 observasi.

Teknik pengumpulan adalah dokumentasi, bersumber dari literatur-literatur perpustakaan, laporan-laporan atau catatan yang mendukung penelitian ini.

Definisi Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan petunjuk variabel diukur. Berikut operasionalisasinya:

1. Pengeluaran Pemerintah Y

Pengeluaran pemerintah periode 2014-2018 yang digunakan adalah data belanja modal

pemerintah diunduh dari BPS yang diukur dalam satuan milyar rupiah.

2. Pajak Daerah X1
Pajak daerah periode 2014-2018 di unduh dari BPS yang diukur dengan satuan milyar rupiah.
3. Retribusi Daerah sebagai variabel X2
Retribusi daerah periode 2014-2018 diunduh dari BPS yang diukur dengan satuan milyar rupiah.

Metode Analisis Data

Metode analisis adalah analisis regresi data panel dengan bantuan E-Views 10. Berikut persamaannya:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e$$

Keterangan :

Y	=	Pengeluaran Pemerintah
X ₁	=	Pajak Daerah
X ₂	=	Retribusi Daerah
β	=	Koefisien Regresi
α	=	Konstanta
e	=	Error Term
i	=	Banyaknya observasi
t	=	Banyaknya waktu

Model Regresi Data Panel:

a. Common Effect Model

Dalam model ini mengabaikan dimensi waktu dan ruang karena intercept dan koefisien slope dianggap konstan. Berikut persamaan regresinya(Gujarati, 2012):

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it}$$

Dimana :

i	: Unit Cross-sectiont (individual)
t	: Periode Waktu

b. Fixed Effect Model

Model analisis ini memiliki asumsi adanya perbedaan intercept antara individu, tetapi intercept antara waktunya sama dan koefisien slope sama antara individu dan waktu. Berikut persamaan regresinya (Gujarati, 2012):

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 W_{it} + D_3 Z_{1it} + e_{it}$$

Dimana:

W _{it}	= 1 untuk daerah ke i
Z _{it}	= 1 untuk periode ke t

c. Random Effect Model

Model ini memiliki asumsi bahwa slope antar individu adalah sama, tetapi intercept berbeda baik antar individu maupun waktu sementara rata-rata intercepnya sama. Berikut persamaan regresinya (Gujarati, 2012):

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it} + \mu_{it}$$

Model Estimasi Regresi Data Panel

a) Uji Chow

Membandingkan *common effect* dengan *fixed effect* (Widarjono, 2017). Hipotesisnya:

$$H_0 : \text{common effect}$$

$$H_1 : \text{fixed effect}$$

H₀ ditolak jika probabilitas cross-section Chi-square < 0,05. Sebaliknya, H₀ diterima jika probabilitas cross-section Chi-square > 0,05.

b) Uji Hausman

Membandingkan *fixed effect* dengan *random effect* (Widarjono, 2017). Hipotesisnya:

$$H_0 : \text{random effect}$$

$$H_1 : \text{fixed effect}$$

H₀ ditolak jika probabilitas cross-section random < 0,05. Sebaliknya, H₀ diterima jika probabilitas cross-section random > 0,05.

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Multikolinieritas

Melihat apakah variabel independennya memiliki hubungan atau tidak dilihat melalui nilai korelasinya. Jika nilai korelasinya di bawah 0,80 maka terbebas multikolinieritas. (Widarjono, 2017).

2) Uji Heteroskedastisitas

Menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan dilihat melalui nilai probabilitas Obs*R-Squared. Jika nilai probabilitas Obs*R-Squared > 0,05 maka terbebas heteroskedastisitas. (Widarjono, 2017).

3) Uji Normalitas

Mengetahui apakah residual berdistribusi secara normal melalui *jarque-Bera* (J-B) Jika nilai *probability* statistik J-B > 0,05 berarti data berdistribusi normal. (Widarjono, 2017).

4) Uji Autokorelasi

Melihat apakah dalam model regres ada korelasi. Menurut (Santoso, 2012) dapat diambil patokan ada tidaknya autokorelasi:

- Angka D-W dibawah -2 ada autokorelasi
- Angka D-W diantara -2 sampai +2 tidak ada autokorelasi
- Angka D-W diatas +2 ada autokorelasi negatif

Pengujian Statistik

Uji t-Statistik

Uji t melihat pengaruh variabel independen terhadap dependen (Ghozali, 2006). Kriteria pengujiannya:

- jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikan 5% atau 0,05, variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
- jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikan 5% atau 0,05, variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya.

Uji F-statistik

Uji simultan melihat pengaruh variabel bebas secara bersama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2006). Kriteria pengujiannya:

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan tingkat signifikan 5% atau 0,05, maka secara bersama variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dengan tingkat signifikan 5% atau 0,05, maka secara bersama variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian R^2 untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat. Dalam (Gujarati, 2012), nilainya sebesar 0 dan 1. Jika R^2 mendekati satu berarti kuat pengaruhnya dan jika R^2 semakin kecil mendekati nol kecil pengaruhnya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Estimasi Regresi Data Panel

1) Hasil Uji Chow

Berikut hasilnya:

Tabel 1.
Hasil Uji Chow

Test cross-section Fixed Effects			
Effects Test	Statistik	d.f.	Prob
Cross-section F	17.175625	(32,130)	0.0000
Cross-section Chi-square	264.951990	32	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data, 2020

Berdasarkan Tabel 1 nilai dari probabilitas *Chi-Square* ($0.0000 < 0.05$), *fixed effect* lebih baik dari *common effect*.

2) Hasil Uji Hausman

Berikut hasilnya:

Tabel 2
Hasil Uji Hausman

Test Cross-Section Random Effects			
Test Summary	Chi-Sq.Statistic	Chi - Sq.d.f	Prob
Cross-Section Random	8.737235	2	0.0127

Sumber: Hasil penelitian, 2020

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross-section ($0.0127 < 0.05$) maka *fixed effect* lebih baik dari *random effect*.

Regresi Data Panel

Model yang terpilih adalah *fixed effect*. Berikut hasilnya:

Tabel 3.
Hasil Uji Fixed Effect Model
Sumber: Hasil penelitian, 2020

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Hitung	Prob
C	-0.9688	4.0893	-0.2369	0.8131
LOG(X1)	1.0355	0.1955	5.2941	0.0000
LOG(X2)	-0.0158	0.0441	-0.3571	0.7216

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh persamaan hasil regresi:

$$\text{LOGY} = -0.9688 + 1.0355\text{LOGX1} - 0.0158\text{LOGX2}$$

- Konstanta sebesar -0.9688 adalah apabila pajak dan retribusi dianggap konstan (0), maka pengeluaran pemerintah 33 provinsi juga konstan sebesar -0.9688%.
- Koefisien pajak (X1) sebesar 1.0355, adalah pajak meningkat 1%, pengeluaran

pemerintah 33 provinsi akan meningkat sebesar 1.0355%.

- Koefisien retribusi (X_2) sebesar -0.0158, apabila retribusi meningkat 1%, pengeluaran pemerintah 33 provinsi akan menurun sebesar 0.0158%.

Hasil Setiap Provinsi Berdasarkan Fixed Effect Terpilih.

Tabel 4
Taksiran Parameter FEM

Provinsi	Koefisien	Intersep
Aceh	1.094276	-2.063064
Sumut	-0.834615	-0.134173
Sumbar	-0.022242	-0.946546
Riau	-0.195287	-0.773501
Jambi	0.224226	-1.211048
Sumsel	-0.475731	-0.493057
Bengkulu	0.340570	-1.309358
Lampung	-0.207722	-0.761066
Kep.babel	-0.158184	-0.810604
Kep.riau	-0.471896	-0.496892
DKI. Jakarta	-0.667676	-0.301112
Jabar	-1.474265	0.505477
Jateng	-1.161210	0.192422
Di yogy	-0.128645	-0.840143
Jatim	-1.319458	0.35067
Banten	-1.013988	0.0452
Bali	-1.136648	0.16786
NTB	0.160535	-1.129323
NTT	0.198626	-1.167414
Kalbar	-0.429477	-0.539311
Kalteng	0.236123	-1.204911
Kalsel	-0.101806	-0.866982
Kaltim	-0.658100	-0.310688
Sulut	0.271875	-1.240663
Sulteng	-0.086477	-0.882311
Sulsel	-0.793336	-0.175452
Sulgara	0.856899	-1.825687
Gorontalo	0.501960	-1.470748
Sulbar	1.016483	-1.985271
Maluku	1.121034	-2.089822
Maluku Utara	1.485580	-2.454368
P. Barat	2.103164	-3.071952
Papua	1.725414	-2.694202

Sumber: Hasil, 2020

Berdasarkan intersep Tabel 4, intersep tertinggi di Jawa Barat = 0.505477, Jawa Tengah = 0.192422, Jawa Timur = 0.35067, Bali = 0.16786 dan Banten = 0.0452. Sedangkan intersep terkecil berada di Sumatera Utara = -0.134173, Gorontalo = -1.470748 dan Sulawesi Selatan = -0.175452.

Berikut penjelasan nilai intersep dua provinsi berdasarkan nilai tertinggi dan terendah:

1. Jawa Barat

Jawa Barat memiliki intersep tertinggi sebesar 0.505477, artinya apabila pajak dan retribusi jawa barat dianggap konstan maka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat juga konstan sebesar 0.51%.

2. Sumatera Utara

Sumatera Utara memiliki intersep terkecil sebesar -0.134173, artinya apabila pajak dan retribusi di Sumatera Utara dianggap konstan maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara juga konstan sebesar -0.13%.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Hasil Uji Multikolinieritas

Berikut hasilnya:

Tabel 5
Hasil Pengujian Multikolinierita

	LOGX1	LOGX2
LOGX1	1.000000	0.520916
LOGX2	0.520916	1.000000

Sumber: Hasil, 2020

Berdasarkan Tabel 5 tidak adanya hubungan korelasi karena setiap nilai korelasi variabel independennya berada dibawah 0.80. Artinya terbebas multikolinieritas.

2) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berikut hasilnya:

Tabel 6
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

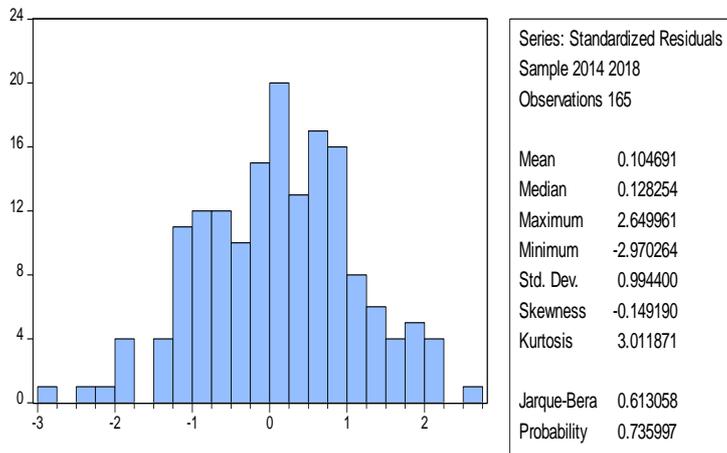
Uji Heteroskedastisitas: White			
F-Statistik	0.397377	Prob.F(2,162)	0.6727
Obs*R-squared	0.805519	Prob.Chi-Square(2)	0.6685
Scaled explained SS	0.956101	Prob.Chi-Square(2)	0.6200

Sumber: Hasil Olah Data, 2020

Berdasarkan hasil heteroskedastisitas type *white test* Tabel 6 nilai probabilitas dari Obs*R-squarednya $0.6685 > 0,05$) Maka tidak ada gangguan heteroskedastisitas

3) Uji Normalitas

Berikut hasilnya:



Sumber: Hasil, 2020

Gambar 1
Hasil Pengujian Normalitas

Dari Gambar 1 nilai dari Jarque-Bera atau nilai dari probabilitas pada *Jarque-Bera* 0.735997 > 0.05. Artinya data berdistribusi secara normal.

Pengujian Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dengan Durbin Watson. Apabila nilai DW > DU dan nilai (4-DW) > DU maka tidak ada gangguan autokorelasi. Berikut hasilnya.

Tabel 7
Hasil Pengujian Autokorelasi

Durbin-Watson stat	1.962646
--------------------	----------

Sumber: Hasil Olah Data, 2020

Berdasarkan Tabel 7 pada hasil data panel *fixed effect*, nilai DW = 1.9626 dan nilai DU = 1.7825 dari Tabel DW, $\alpha = 5\%$ pada K-3 dan n 165. Oleh karena itu, DW > DU dan (4-DW) > DU atau (1.9626 > 1.7825) dan (2.0374 > 1.7825). tidak adaindikasi autokorelasi

Hasil Uji t-Statistik

Berikut hasil uji parsialnya:

Tabel 8
Hasil Uji t

Variabel Bebas	t-Statistik	t-Tabel	Prob
X1	5.2491	1.6540	0.0000
X2	-0.3571	0.6760	0.0004

Sumber: Hasil, 2020

Berdasarkan Tabel 8 bahwa:

1. variabel pajak (X1) memiliki nilai $t_{hitung} = 5.2941 > t_{tabel} 1.6540$ ($\alpha 0.05$), maka H_1 diterima dan tolak H_0 , pajak (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

pengeluaran pemerintah 33 provinsi di Indonesia.

2. variabel retribusi daerah (X2) memiliki nilai $t_{hitung} = -0.3571 < t_{tabel} 0.6760$ ($\alpha 0.25$), maka H_2 ditolak dan terima H_0 , retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah 33 provinsi di Indonesia.

Hasil Uji F-Statistik

Berikut hasil ujinya:

Tabel 9
Hasil Uji F

F-Statistik	F- Tabel	Probabilitas
34.45535	3.05	0.000000

Sumber: Hasil regres, 2020

Berdasarkan Tabel 9 nilai $F_{hitung} 34.45535 > F_{tabel} 3.05$ dari alpha 0.05, maka secara bersama-sama dengan tingkat kepercayaan 95% pajak dan retribusi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah 33 provinsi di Indonesia. Probabilitasnya juga signifikan $0.000000 < 0.05$.

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Berikut hasilnya:

Tabel 10
Hasil R^2

Adjusted R-squared	0.873990
--------------------	----------

Sumber: Hasil Olah Data, 2020

Berdasarkan Tabel 10 nilai Adjusted R-Squared sebesar 0.873990, pengaruhnya sangat kuat sebesar 87.40% sedangkan 12.60% lainnya dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini.

Pengujian Koefisien Korelasi

Berikut Hasilnya:

Tabel 11
Hasil Uji Koefisien Korelasi

R-squared	0.900114
-----------	----------

Sumber: Hasil Olah Data, 2020

Berdasarkan Tabel 11 nilai koefisien korelasi (r) 0.900114 atau 90,01%, artinya ada hubungan korelasi yang sangat kuat antara variabel bebas dengan terikat.

Pembahasan

Fixed effect merupakan model regresi yang terpilih. Berikut penjelasannya:

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia Tahun 2014-2018.

Pajak daerah terhadap pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan, artinya pajak bagian PAD terbesar, sehingga semakin tinggi pajak, belanja pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah tinggi pula.

Hasil penelitian sejalan dengan (Febriyanti, 2017) pajak berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur. Hasil penelitian tidak sejalan dengan (Heru et al., 2015) pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten/Kota di Aceh.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia Tahun 2014-2018.

Retribusi daerah terhadap pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan. Artinya apabila terjadi peningkatan ataupun penurunan pada jumlah retribusi daerah tidak mempengaruhi belanja pemerintah.

Hasil penelitian sejalan dengan (Subowo & Bagus, 2014) retribusi tidak berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota DI Yogyakarta. Hasil penelitian tidak sejalan dengan (Ningsih, 2017) retribusi berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Utara.

5. PENUTUP

Kesimpulan

1. Variabel pajak secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah 33 Provinsi di Indonesia
2. Variabel retribusi secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan bernilai negatif terhadap pengeluaran pemerintah 33 Provinsi di Indonesia.

Saran

1. Disarankan kepada pemerintah hendaknya dapat mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan retribusi sehingga semakin besarnya kontribusi penerimaan diharapkan tingkat kemampuan daerah atau provinsi mampu memenuhi kebutuhannya yang bersumber dari dua faktor ini.
2. Hasil analisis ini dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang

pajak dan retribusi terhadap pengeluaran pemerintah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian. (2007). *Akuntansi Sektor Publik. Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Boediono. (2001). *Ekonomi Makro*.
- Effendi, & et.al. (2019). Determinan Belanja Pemerintah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Mulawarman*.
- Febriyanti. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Riset Dan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya*, 6(12), 1–17.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis Multivariate dengan Program SPSS* (4th ed.). Universitas Diponegoro.
- Gujarati, N. . (2012). *Dasar-Dasar Ekonometriks* (7th ed.). Salemba Empat.
- Heru, F., Sri, P. H., & Syukriy, A. (2015). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah , Retribusi Daerah Dan Di Kabupaten / Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(2), 45–50.
- Lestari, I., Henry, A., & Muammar, K. (2016). The Effect Of Local Taxes , Local Levies , General Allocation Funds (Dau), And Special Allocation Funds (Dak) To The Government Capital Expenditures Of Banda Aceh City. *The 1st International Conference on Economics, Education, Business, and Accounting (ICEEBA 2016)*, 513–526.
- Mankiw, N. . (2018). *Pengantar Ekonomi Makro* (7th ed.). Salemba Empat.
- Ningsih, H. T. K. (2017). The Effect of Regional Tax and Regional Retribution on Regional Expenditure in Local Governments of North Sumatera Province. *Proceedings of The 7th Annual International Conference (AIC) Syiah Kuala University and The 6th International Conference on Multidisciplinary Research (ICMR) in Conjunction with the International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICELT)*, 220–227. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/AICS-Social/article/view/10194/8647>

- Raharjo. (2009). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu.
- Rahmawati, R. (2018). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Si DI Yogyakarta Tahun 2012-2016*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.
- Santoso, S. (2012). *Paduan Lengkap SPSS Versi 20*. PT Elex Media Komputindo.
- Subowo, & Bagus, B. L. (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4207>
- Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi Teori Pengantar* (Edisi Ketiga). PT Rajagrafindo Persada.
- Sulistiyowati, D. (2011). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Susanti, & et.al. (2000). *Indikator-Indikator Makroekonomi* (Edisi 2). Lembaga FEUI.
- Tolosang, K. D., Sandry, Y. M., & J. B, K. (2013). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013). *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi, Manado*, 1–14.
- Widarjono, A. (2017). *Ekonometrika* (Edisis 4). UPP STIM YKPN.
- Yani. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. PT Rajagrafindo Persada.